

PENJABAT GUBERNUR AGUS FATONI PERLU MENGGESER ANGGARAN UNTUK MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN



Sumber gambar: <https://www.detik.com/>

Isi berita:

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni optimis bisa mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah Sumsel. Salah satu solusinya adalah dengan pergeseran anggaran di pemda. Fatoni mengungkapkan, dalam penanganan karhutla ini dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, yakni TNI/Polri, DPRD, bupati, wali kota, dan seluruh masyarakat Sumsel. Dirinya pun berharap jangan sampai kabut asap dari karhutla menyeberang ke daerah lain, bahkan ke negara lain.

“Saya yakin seluruh pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Karena ini menyangkut nama baik bangsa kita. Apalagi kalau sampai mengekspor (asap) ke negara lain. Oleh karena itu harus ditangani, karena ini menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat,” katanya. Menurut Fatoni, ada tiga unsur yang menyebabkan terjadinya karhutla dan kabut asap, yakni faktor cuaca, banyaknya lahan gambut, dan perilaku perusahaan atau perorangan. Dia pun mengajak semua unsur untuk berperan aktif dan kompak dalam mengatasi permasalahan karhutla.

Fatoni tak menampik adanya kekurangan alokasi dana atau anggaran untuk pengendalian karhutla. Untuk itu, diperlukan pergeseran anggaran dalam APBD sebagai solusi. “Terkait dengan anggaran ini kan daerah banyak yang menyampaikan tidak sesuai maka kita jelaskan bagaimana solusi untuk melakukan pergeseran anggaran dalam kondisi darurat dan terdesak ini, bisa dilakukan melalui perubahan terhadap anggaran APBD, sama seperti kita dulu menangani covid,” ujarnya.

Pj Gubernur Sumsel itu mencontohkan pergeseran anggaran yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19. "Covid-19 dulu sebelumnya tidak ada, tapi begitu ada Covid semua *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid, begitu juga dengan ini, maka fokus kita adalah mengatasi kebakaran dan dampak sosial ekonomi," lanjutnya.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6966645/pj-gubernur-agus-fatoni-sebut-perlu-geser-anggaran-untuk-atasi-karhutla>, Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Perlu Geser Anggaran Untuk Atasi Karhutla, 5 Oktober 2023.
2. <https://simbursumatera.com/?p=37308>, Geser Anggaran Untuk Penanganan Karhutla Sumsel, 5 Oktober 2023.

Catatan:

Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 163, *Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.*
 - Pasal 164 ayat (3), *Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.*
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - Lampiran terkait pengaturan ketentuan mengenai BTT (Belanja Tidak Terduga), *Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*